

COOPERATIVE FARMING DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI PROVINSI BALI

I Made Mahadi Sanatana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar
kdkdk @.d.d..d.

Abstrak - Kemiskinan mayoritas ditemukan pada masyarakat yang penduduknya menggeluti pekerjaan di sektor pertanian. Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja para petani, baik yang bersifat on farm maupun program yang mencakup nilai tambah pada *off-farm*. Namun hasilnya tetap tidak efisien dan tidak efektif. Permasalahan utama dari semua itu adalah lemahnya sistem pengelolaan usahatani, yang masih dilakukan secara individu. Implikasi dari sistem pengelolaan individualis pada petani gurem adalah sulitnya mereka beranjak dari subsistensi. Secara riil mereka tetap berada pada kondisi yang lemah (*powerless*) dalam segala hal. Seperti dalam penguasaan lahan, informasi, penyediaan modal, pengadaan sarana produksi pertanian, pengadaan tenaga kerja, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Masalah dari pembangunan pertanian bukan pada perangkat teknologinya, tetapi struktur kelembagaannya dalam masyarakat pedesaan, yang menentukan apakah teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif atas distribusi pendapatan, aspek kelembagaan akan tetap berperan penting dalam pembangunan pertanian, maka diperlukan usaha khusus pemberdayaan petani yang antara lain dapat dilakukan melalui *cooperative farming*.

Kata kunci: pemberdayaan petani, kelompok tani, pengelolaan usahatani, *cooperative farming*

Abstract - Poverty is found in the majority of people whose inhabitants work in the agricultural sector. The government has made some policy to improve the performance of farmers, both those that are on farm and programs that include added value to off-farm. But the results remain inefficient and ineffective. The main problem of all that is the weakness of the farm management system, which is still done individually. The implication of the individualist management system for smallholders is the difficulty of moving from subsistence. In real terms they remain in a weak condition (*powerless*) in everything. As in land tenure, information, capital provision, procurement of agricultural production facilities, procurement of labor, marketing, processing, and so on. The problem of agricultural development is not the technological device, but the institutional structure in rural communities, which determines whether the technology has a negative or positive impact on income distribution, institutional aspects will continue to play an important role in agricultural development, so a special effort to empower farmers is needed, among others done through cooperative farming.

Keywords: Farmer empowerment, farmers, farm management, cooperative farming

1. Latar Belakang

Kemiskinan mayoritas ditemukan pada masyarakat yang penduduknya menggeluti pekerjaan di sektor pertanian. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2017, yang menunjukkan bahwa 32,88 persen rumah tangga miskin di Indonesia adalah rumah tangga pertanian. Sisanya lagi sebesar 39,18 persen berasal dari mereka yang tidak bekerja, dan 27,94 persen berasal dari penduduk yang bermata pencaharian bukan pertanian. Hal ini terkait dengan pendapatan petani dan buruh tani yang rendah dibandingkan upah di sektor lainnya. Upah rata-rata buruh tani per hari pada tahun 2012 sebesar Rp. 40.302, sedangkan upah rata-rata buruh bangunan yaitu sebesar Rp. 65.148. Selain rendah, upah buruh tani secara riil menurun sebesar 1,72 persen pada tahun 2012, dibandingkan tahun 2011 (Bapenas, 2014).

Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja para petani, misalnya program intensifikasi, baik yang hanya bersifat on farm seperti program Bimbingan Masal (BIMAS) pada tahun 1965, Intensifikasi Masal (INMAS) pada tahun 1968 yang disempurnakan menjadi Intensifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979, SUPRA INSUS pada tahun 1984, Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) pada tahun 2002, maupun program yang mencakup nilai tambah pada off-farm seperti Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS). Namun hasilnya tetap tidak efisien dan tidak efektif. Permasalahan utama dari semua itu adalah lemahnya sistem pengelolaan usahatani, tegasnya pengelolaan usahatani masih dilakukan secara individu atau tercecer.

Implikasi dari sistem pengelolaan individualis pada petani gurem adalah sulitnya mereka beranjak dari subsistensi. Secara riil mereka tetap berada pada kondisi yang lemah (*powerless*) dalam segala hal.

Seperti dalam penguasaan lahan, informasi, penyediaan modal, pengadaan sarana produksi pertanian, pengadaan tenaga kerja, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Seperti halnya informasi (atau inovasi) yang terkait dengan pertanian, bagi petani itu merupakan kebutuhan yang bersifat dinamis. Namun pada kenyataannya, tidak semua individu memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya. Media komunikasi atau sumber informasi yang jumlahnya terus meningkatpun tidak senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh petani. Sementara penyuluh pertanian yang dulu disanjung petani dan berperan sebagai ujung tombak pencapaian swasembada beras berada dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) juga. Begitu juga dengan akses petani kecil terhadap modal, pasar, sarana produksi pertanian, dan sumber-sumber produktif lainnya tetap lemah.

Diposisikannya petani kecil dalam relasi kemitraan pun tetap tidak membuat mereka berdaya. Meskipun Undang-Undang Kemitraan Nomor 9 Tahun 1995 sudah diberlakukan, dan dengan tegas menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Namun, seringkali petani kecil dirugikan karena modus eksploitasi dari pengusaha. Hasil penelitian Teguh Kismantoro adji (2003) tentang kemitraan petani sayuran menunjukkan bahwa kemitraan ditandai dengan dominannya konflik dan ketergantungan, disebabkan cara pembayaran, perlakuan mendikte, penentuan harga jual dan keuntungan secara sepihak oleh pihak inti, dan sebagainya.

Kehadiran pengusaha agribisnis pada kenyataannya juga tidak mengangkat petani kecil. Kecenderungannya mereka muncul sebagai penguasa baru dalam segala hal, hingga memperbesar kesenjan-

gan dengan lapisan petani kecil. Sekalipun terjadi transpormasi informasi dari petani lapisan atas kepada kelas petani lainnya, namun petani kecil tetap tidak mendapatkan surplus, karena proses tersebut berjalan lambat (Rivera et.al., 1991).

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dan suramnya peluang reformasi agraria (landreform) secara adil, maka petani tidak dapat lagi hanya mengandalkan cara-cara lama, tetapi dituntut untuk terus meningkatkan daya saing, baik sisi penawaran (*supply side*) maupun sisi permintaan (*demand side*). Oleh karena itu mereka yang mayoritas berlahan sempit dan tercecceh harus bersatu dalam satu ikatan kerjasama pengelolaan yang kuat. Jika tetap tidak, maka sudah dapat dipastikan mereka akan tersingkir dari persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, bahkan menurut Sa'id dan Intan (2001) tidak menutup kemungkinan petani kita akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Sinaga dan White (1980) mengatakan bahwa yang menjadi masalah dari pembangunan pertanian bukan pada perangkat teknologinya, tetapi struktur kelembagaannya dalam masyarakat pedesaan, yang menentukan apakah teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif atas distribusi pendapatan. Hal yang sama disampaikan oleh Mubyarto (1994), yang dengan tegas mengatakan bahwa aspek kelembagaan akan tetap berperan penting dalam pembangunan pertanian, maka diperlukan usaha khusus pemberdayaan petani yang antara lain dapat dilakukan melalui *cooperative farming*.

Atas dasar pemikiran itu, maka menarik untuk dianalisis bagaimana sesungguhnya keragaan model *cooperative farming*, dan apa dampak model *cooperative farming* terhadap keberdayaan petani.

2. Kajian Teori

Cooperative farming dapat didefinisikan sebagai model usaha tani dimana

sejumlah areal pertanian yang dikelola secara kolektif, baik berdasarkan ikatan famili, kelompok tani, ataupun ikatan kelompok lainnya, yang merupakan hasil penggabungan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai skala ekonomis dalam pengelolaannya (Sa'id dan Intan, 2000). Melalui model *cooperative farming* petani dapat dengan mudah mengakses sumberdaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan usahatani. Petani tidak perlu memikirkan bibit, modal untuk membayar tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, dan pasar. Secara teknis teknologi, pertanian modern dapat diimplementasikan secara optimal, dan keseragaman pola tanam yang berperan dalam mengendalikan hama penyakit. Hal ini tidak terlepas dari peran kelompok dalam menerapkan metode partisipatif dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol aktivitas usahatani. Kondisi ini sangat dirasakan oleh para petani kecil terutama yang berstatus sebagai penyakap.

Tujuan jangka panjang *cooperative farming* menurut Fakih (2003) adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri dalam artian berbasis komunitas, berdaya saing, berkelanjutan, efektif dan efisien melalui pengelolaan usahatani secara ekonomis, kolektif dan partisipatif. Model ini mirip dengan sistem Agribisnis Berbasis Komunitas sebagaimana diungkapkan oleh Sitorus (2001), dimana prinsip dari pengembangannya adalah membangun keterpaduan dan kemandirian pengambilan keputusan bersama.

Instrumen utama yang menjadi kekuatan dalam model *cooperative farming* adalah kelembagaan, yaitu peraturan-peraturan hasil kesepakatan bersama dan institusi kelompok tani sehamparan. Helmi (1997) menyatakan bahwa konsep kelembagaan bisa dipahami secara berbeda oleh berbagai orang. Untuk itu penting terlebih dahulu memahami arti dari

kelembagaan. North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai kerangka kerja di mana interaksi diantara manusia terjadi. Lebih jauh ia membedakan antara kelembagaan (institusi) dan organisasi. Menurutnya, organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat. Ada beberapa alasan pokok mengapa kelembagaan menjadi kekuatan utama dalam model *cooperative farming* ini:

1. Kelembagaan adalah alat untuk memfasilitasi kegiatan bersama (connected action) dalam mencapai kemajuan sosial ekonomi dalam pembangunan (Brinkerhoff dan Goldsmith, 1992).
2. Kelembagaan membentuk pola interaksi di antara manusia dan hasil-hasil yang bisa dicapai oleh individual dalam proses interaksi tersebut (Ostrom, 1992).
3. Kelembagaan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari sejumlah input (masukan tertentu), atau sebaliknya dapat menurunkan efisiensi hingga seseorang harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang sama (Ostrom, 1992).
4. Kelembagaan membentuk perilaku individu melalui dampak insentif yang ditimbulkannya (Ostrom, 1992).

Di antara insentif yang dimaksudkan oleh Ostrom adalah insentif material dalam bentuk uang atau barang dan insentif lainnya seperti kondisi kerja yang lebih baik, terbentuknya hubungan sosial yang menyenangkan, dan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan penting dan berskala besar.

Paling tidak terdapat empat perhatian pokok yang perlu ditekankan dalam penguatan kelembagaan usahatani pedesaan, yaitu terkait kelembagaan alih/transfer teknologi, keuangan dan permodalan usahatani, produksi/usaha tani, dan pemasaran hasil (Sudaryanto dan Agustian, 2003). Penguatan kelembagaan pedesaan

harus memiliki makna peningkatan daya saing usahatani. Menurut Lauer (Pranadji, 2006) bahwa isu penting dari kelembagaan adalah tata nilai yang menghidupkan kelembagaan. Jika kelembagaan ekonomi diisi oleh tata nilai maju (mengalami peningkatan) maka dipastikan daya saing ekonomi (usahatani) yang digerakkan oleh kelembagaan ekonomi desa akan tinggi dan berkelanjutan, dan sebaliknya.

3. Pembahasan

Cooperative Farming

Pada umumnya petani telah terbiasa teknologi asli pedesaan yang berkembang secara evolusi dan memerlukan waktu yang lama. Resistensi terhadap teknologi baru lebih besar apabila petani belum memahami, membuktikan, dan mempraktikkannya sendiri. Pemahaman bagi petani adalah pembuktian secara empiris, tanpa harus mengetahui bagaimana proses, sebab akibat atau hubungan dengan faktor lain dan petani sering mengadopsi teknologi secara parsial, tahap demi tahap. Oleh karena itu, peranan lembaga yang menjembatani alih teknologi antara penghasil teknologi dengan pengguna teknologi merupakan hal yang paling krusial.

Proses transfer teknologi diharapkan dapat ditingkatkan dengan adanya BPTP di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran lembaga tersebut maka jaringan penelitian dan pengkajian pertanian akan dapat langsung ditujukan pada pengguna. Secara ideal, identifikasi kebutuhan teknologi usahatani bagi petani dilakukan sebelum proses penyusunan teknologi dilakukan, sehingga dapat diperhatikan faktor teknis, budaya, sosial dan ekonomi pengguna.

Namun, pendekatan kelembagaan dengan menerapkan alih/transfer teknologi tidak boleh dilakukan secara koersif. Kebijakan-kebijakan teknis yang didasarkan pada tuntutan teknologi secara negatif berpengaruh terhadap pemerataan dan kesempatan berpartisipasi masyarakat

yang selama ini dijamin oleh norma sosial dan tata peraturan setempat sebagai suatu kelembagaan lokal (Suradisastra, 2006). Tantangan yang paling berat dalam mengembangkan sistem usaha tani yang mampu untuk diadopsi dan dilaksanakan oleh petani adalah memaksa petani untuk melaksanakan sistem pertanian yang sudah ditentukan karena (Pannell, 1999). Petani cenderung memiliki pola pikir yang menjadi budaya dalam bertani, yaitu menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupan mereka dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan cara bertani mengambil resiko (Soetomo, 2008). Keinginan untuk menghindari resiko dialami juga oleh petani di Bali, petani muda cenderung menghindari resiko yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Dalam hal penggunaan pupuk organik, petani muda lebih menghindari resiko beralih ke penggunaan pupuk organik dalam usahatani karena hasilnya yang jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan pupuk kimia (Sanatana, 2018).

Aspek kelembagaan pembiayaan/permodalan usahatani merupakan hal penting khususnya bagi kegiatan usaha tani. Para petani harus senantiasa dapat mempersiapkan modal setiap awal musim tanam, sebagian besar petani pedesaan lemah dalam permodalan. Dengan demikian, walupun adopsi teknologi mendatangkan keuntungan yang tinggi, tetapi karena tidak tersedianya modal maka adopsi tidak bisa dilakukan. Berbagai kelembagaan kredit masih diperlukan dan ditingkatkan layanannya.

Sejumlah kredit pernah dikucurkan pemerintah untuk sektor pertanian, yaitu Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Setelah era KLBI, pemerintah menyediakan permodalan bagi petani yang dikenal dengan kredit program, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan En-

ergi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dengan jumlah sebanyak itu, kredit program belum mampu memenuhi permodalan seluruh petani di Indonesia. Kredit program seringkali gagal karena kurang adanya pendampingan usaha yang memadai, akibatnya petani kembali mengalami masalah akibat lilitan hutang yang baru. Hal ini terkait erat dengan sistem persyaratan dan prosedur yang sulit, suku bunga tinggi, dan periode pembayaran yang tidak sesuai bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dan prosedur baru yang bisa memudahkan akses petani terhadap modal.

Kelembagaan dalam usahatani yang penting lainnya adalah pemasaran dan sistem harga dari output usahatani. Peranan lembaga yang ada telah berjalan secara baik dan efisien, namun sistem harga yang terjadi kurang menguntungkan petani. Pada saat panen raya terutama di sentra-sentra produksi, harga gabah jatuh terkadang jauh di bawah harga dasar (floor price). Sehingga perlu adanya upaya khusus untuk mengatasi permasalahan ini yang hampir setiap tahun terjadi.

Berdasarkan definisi *cooperative farming* yang telah dikemukakan di atas, maka kegiatan Kelompok Tani yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia mirip dengan ciri-ciri *cooperative farming*. Bedanya, dari segi pengelolaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen, seperti halnya sistem pengelolaan yang tersirat dalam *cooperative farming*. Masing-masing anggota kelompok tani yang memiliki lahan biasanya mengelola lahannya secara sendiri-sendiri, sehingga walaupun mendapat bantuan pengadaan input, teknologi, informasi, dan modal melalui kelompok taninya, tetapi tetap skala ekonomis usahatani sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan lahan-lahan yang telah terfragmentasi yang dimiliki oleh

masing-masing anggota Kelompok Tani dalam suatu sistem Manajemen Usaha Kelompok Tani Terpadu (Setiawan, 2008).

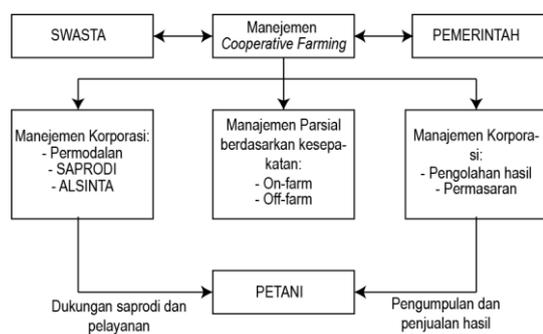
Mekanisme Lahirnya model Cooperative Farming

Lahirnya *cooperative farming* senyatanya sebagai akibat dari kurang dan tidak terlayannya kebutuhan lembaga-lembaga pelayanan yang ada. Akibatnya, petani, selaku pihak yang dibebani untuk mencapai ketahanan pangan, tidak mendapatkan informasi yang efektif dan memadai untuk memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Model *cooperative farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan sarana produksi (saprodi) dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasaan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha off farm yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal (Nuryanti, 2005).

Koordinasi secara vertikal dan horizontal akan melibatkan banyak *stakeholder* yang diwadahi suatu kemitraan dalam penerapan model *cooperative farming* (gambar 1). *Stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam penerapan model *cooperative farming* adalah petani, swasta, dan pemerintah. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sebagai anggota, petani harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha *on-farm* dan *off-farm*, serta menyepakati teknologi yang akan dilaksanakan dan menerapkan teknologi tersebut. Pihak swasta sebagai

penanam modal/investor melalui jalinan kemitraan *cooperative farming* dari sub-sistem hulu sampai hilir. Sebagai mitra sub-sistem hulu, pihak swasta menanamkan modalnya dengan menyediakan sarana produksi pertanian, yaitu benih, pupuk, dan obat-obatan untuk berusaha tani. Sebagai mitra sub-sistem hilir, pihak swasta bertanggung jawab sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi, dan alsintan (alat dan mesin pertanian), serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil (Nuryanti, 2005).



Gambar 1 Rancang Bangun Model *Cooperative Farming* (Nuryanti, 2005)

Namun fakta dilapangan, banyak hambatan yang mengakibatkan model di atas tidak terlaksana dengan baik. Terutama dari sisi sumber daya petani, yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga sangat susah apabila diberlakukan suatu sistem manajemen dalam proses bertaninya. Belum lagi monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta dalam kemitraan. Kehadiran pengusaha agribisnis pada kenyataannya juga tidak mengangkat petani kecil. Kecenderungannya mereka muncul sebagai penguasa baru dalam segala hal, hingga memper-

besar kesenjangan dengan lapisan petani kecil. Sekalipun terjadi transformasi informasi dari petani lapisan atas kepada kelas petani lainnya, namun petani kecil tetap tidak mendapatkan surplus, karena proses tersebut berjalan lambat (Rivera et.al., 1991). Disitulah pemerintah muncul untuk melaksanakan perannya sebagai fasilitator, sehingga pihak swasta dapat membantu petani meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan pendapatannya yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan perusahaan yang bergabung dalam kemitraan itu.

Mekanisme Kerja *Cooperative Farming*

Model *cooperative farming* yang direkomendasikan oleh para pakar dan petani pada dasarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan model *estate farming* dan *corporate farming*. Namun demikian, mekanisme kerja dari *cooperative farming* lebih bersifat perpaduan atau sinergi antara mekanisme konseptual dengan mekanisme sosial hasil kesepakatan. Secara riil, mekanisme kerja *cooperative farming* adalah sebagai berikut (Setiawan, 2002):

1. Kelompok tani sehamparan merupakan lembaga milik dan kepercayaan bersama petani sebagai lembaga yang memayungi petani anggota kelompok. Petani adalah anggota kelompok dan sekaligus berperan sebagai pihak yang mengusahakan lahan usahatannya, mereka harus sadar dan patuh atas kesepakatan-kesepakatan bersama.
2. *Cooperative farming* didirikan oleh petani melalui musyawarah mufakat antara para anggota dengan memperhatikan aspirasi dan aspek sosial budaya setempat.
3. *Cooperative farming* dipimpin oleh seorang tokoh tani atau ketua kelompok tani yang dipercaya oleh anggot-

anya dan memiliki profesionalisme. Ia dipilih oleh petani anggota kelompok tani dan didampingi oleh seorang sarjana profesional.

4. Pengelolaan lahan dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok tani dan tidak diserahkan kepada suatu lembaga agribisnis lainnya.
5. Perencanaan pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya usahatani termasuk teknologi yang akan diterapkan dibuat dan disepakati secara partisipatif berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah direkomendasikan para ahli atau institusi dan disinergikan dengan pengalaman petani atau pengetahuan lokal.
6. Dalam *cooperative farming*, kelompok tani juga bekerjasama dengan kelembagaan-kelembagaan pertanian setempat, termasuk dengan kelembagaan desa, Dinas Pertanian, dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
7. Pada tahap awal *cooperative farming*, kelompok melakukan beberapa langkah preventif, seperti penyeleksian dan pembatasan anggota kelompok. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan pengelolaan pada tahap prakondisi, dan mencegah masuknya petani yang bias orientasi. Secara sosial hal ini ditujukan pula untuk mendidik dan menanamkan kepercayaan kepada petani yang belum menjadi anggota kelompok.
8. Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan intensif, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengendalian dini permasalahan-permasalahan teknis di lapangan.
9. Dana awal yang digulirkan di dalam kelompok pada mulanya merupakan dana pinjaman dengan tingkat bunga rendah, dan sebagian merupakan hibah atau dana stimuli dari pemerintah

daerah.

Menurut Simatupang (2002), usaha pertanian pada umumnya bersifat *constant return to scale* yang berarti biaya rata-rata bersifat konstan artinya tidak berhubungan dengan volume produksi usahatani. Kalaupun ada, skala ekonomi terdapat pada aktivitas di luar usahatani seperti pemasaran dan pengolahan hasil. Hal ini terjadi karena teknologi pertanian pada umumnya netral scale. Teknologi biologis (benih) dan kimiawi (pupuk dan pestisida) bersifat divisible (terbagikan sampai satuan terkecil) sehingga dapat diterapkan secara optimal baik pada usahatani kecil maupun pada usahatani besar.

Beberapa mekanisme kerja yang bersifat sosiologis, ekonomis, dan teknis dalam *cooperative farming* yang telah berhasil diterapkan pada kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Semua kebutuhan usahatani anggota disediakan oleh kelompok tani dan anggota diharuskan mengalokasikan semua sumberdaya yang telah disediakan tersebut. Harapannya pengelolaan usahatani dapat berjalan optimal.
2. Alokasi sarana produksi pertanian diharuskan tepat waktu, tepat guna, dan tepat jumlah. Untuk itu pendistribusiannya dikelola oleh kelompok secara tepat pula.
3. Secara teknis, sistem pengairan dan pengendalian hama penyakit juga dikelola secara kolektif.
4. Pemasaran hasil usahatani semuanya dikelola oleh kelompok.
5. Pembayaran pinjaman (kredit) dilakukan oleh kelompok melalui mekanisme pemotongan hasil penjualan.

Peranan Cooperative Farming

Berbicara tentang peranan *cooperative farming* secara sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan sesungguhnya tidak berbeda dengan Kelompok Tani di

Taiwan, Thailand, Malaysia, dan India. Di Banglades terdapat organisasi irigasi yang mengelola air tanah, ternyata berhasil melakukan fungsi bisnis yang mencakup usaha perkreditan, pemasaran hasil pertanian, pengadaan sarana produksi dan penyewaan mesin-mesin pertanian.

Di beberapa negara lain, organisasi petani seperti kelompok tani dan perhimpunan petani pemakai air banyak yang sudah mampu berperan dalam banyak hal. Di Malaysia dan Thailand yang pemberdayaan kelompok dan pemuda taninya telah dilakukan sejak tahun 1992, telah ada kelompok tani yang mampu berperan dalam kegiatan ekonomi seperti: pengadaan saprotan, perkreditan, pemasaran

hasil-hasil pertanian, pengolahan pasca panen, dan pemberian pelayanan penyuluhan pertanian. Begitu pun di Gujarat India terdapat organisasi petani yang mengelola irigasi yang mampu melakukan kegiatan bisnis, seperti pengadaan sarana produksi pertanian, perkreditan, pemasaran hasil-hasil pertanian, pengolahan pasca panen, dan pemberian penyuluhan pertanian.

Peranan *cooperative farming* sesungguhnya tidak hanya dalam pengelolaan usahatani dan pemasaran hasilnya saja, tetapi juga mampu menumbuhkan kaum perempuannya (ibu-ibu tani). Melalui *cooperative farming* ibu-ibu juga bisa melakukan pengembangan ekonomi melalui pengembangan agroindustri, seperti membuat makanan ringan, menjual beras dalam kemasan-kemasan khusus, dan ikut serta mengelola lumbung. Secara riil, *cooperative farming* cukup berperan dalam pemberdayaan usahatani petani (Candra, 2001).

Secara sosial, keberadaan *cooperative farming* juga berperan dalam meningkatkan komunikasi antara petani dan dengan pihak-pihak luar, seperti para bandar beras, para mahasiswa yang melakukan kunjungan dan penelitian, dan perusa-

haan sarana produksi pertanian. Melalui *cooperative farming* posisi tawar dan akses anggota menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak menjadi bulan-bulanan pengusaha saprotan, tengkulak, dan peminjam modal liar.

Secara ekonomi, keberadaan *cooperative farming* berperan dalam penyediaan modal kerja, sarana produksi pertanian, bibit, dan sebagainya yang dapat diperoleh dengan harga lebih murah dan mudah. Pemasaran hasil produksi ditampung oleh kelompok dan dijual pada saat harga menguntungkan. Posisi tawar petani menjadi meningkat karena pengambilan keputusan harga ditentukan secara bersama-sama di dalam musyawarah kelompok. Adanya lumbung menumbuhkan kesadaran petani untuk menyimpan atau menabungkan hasil panennya dalam bentuk gabah. Penjualan hasil dalam bentuk beras oleh kelompok memberikan keuntungan kepada petani dengan selisih keuntungan Rp. 300,- per kilogram gabah dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk gabah. Penjualan dengan sistem kolektif juga meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan dan transformasi.

Secara teknis, pengelolaan usahatani anggota berjalan optimal, segala kebutuhan dan permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan kesepakatan kelompok, setiap petani dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dan sarana produksi pertanian. Pola tanam dapat berjalan tepat waktu (serempak) karena pelaksanaannya berada dibawah komando kelompok. Dengan demikian serangan hama dan penyakit dapat ditekan. Kekurangan air pada musim kemarau dapat diantisipasi dengan pompanisasi yang murah, karena menggunakan mesin pompa milik bersama (kelompok). Secara riil, optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan ketepatan dalam aspek lainnya telah meningkatkan hasil panen padi petani per hektar, yakni

dari rata-rata 4.7 ton per hektar meningkat menjadi 5.5 ton sampai 6 ton per hektar (Candra, 2001).

Secara kelembagaan, adanya pelayanan yang meyakinkan dari *cooperative farming* telah mendorong petani untuk patuh atas kesepakatan kelompok. Kelompok yang jaringannya dengan lembaga desa cukup erat, juga dapat dengan efektif dalam mengkomunikasikan jadwal tanam, pertemuan petani tingkat desa, dan dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Hubungan kelompok dengan dinas terkait dan pihak-pihak terkait lainnya, baik terkait dengan modal, sarana produksi pertanian, maupun pasar juga terjalin cukup erat. Hadirnya sarjana pendamping sedikit banyak dirasakan oleh para petani. Karena disamping aktif dan komunikatif, juga dapat membenahi administrasi kelompok, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembukuan, dan badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada gapoktan Simantri, dimana hubungan komunikasi interpersonal antar petani dalam satu kelompok, dengan anggota gapoktan Simantri lainnya, dan dengan tenaga pendamping serta pemerintah mempengaruhi pembentukan sikap dari petani dalam melaksanakan adopsi teknologi yang diterapkan pada program Simantri sehingga mempengaruhi kesempatan kerja yang diperoleh dalam gapoktan Simantri (Sanatana, 2018).

Dampak Cooperative Farming terhadap Keberdayaan Petani

Keberdayaan sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keberdayaan jangka pendek dan jangka panjang. Secara konseptual keberdayaan yang dikehendaki oleh sebuah upaya pemberdayaan (empowerment) adalah kedua-duanya, hanya penekanannya lebih kepada yang jangka panjang (Chambers et.al., 1993). Keberdayaan jangka pendek biasanya terwu-

jud oleh karena adanya stimuli, misalnya bantuan dana KUT dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan, kematangan, dan kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya (Adimihardja, 1999).

Inti dari pemberdayaan adalah bahwa dalam melakukan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian, pengelola program pembangunan tersebut harus mempunyai kemampuan bersikap membiarkan masyarakat tani menentukan sesuatu yang mereka kehendaki dengan cara-cara yang mereka anggap baik. Pada model pendekatan pembangunan yang demikian, manajemen partisipatif merupakan hal penting yang harus diusung oleh kelembagaan-kelembagaan yang terjun ke pedesaan. Kelembagaan diyakini akan mempengaruhi bentuk perilaku dan pola kegiatan terorganisasi yang muncul dalam kaitan dengan pembangunan pertanian.

Model cooperative farming sesungguhnya berangkat dari perspektif pertanian yang bersifat melibatkan mayoritas kaum tani (egalit) sebagai subyek, yang menginginkan akses mereka terhadap nilai tambah komoditas agribisnis di hulu dan hilir serta di pertanian primer sendiri mengalami peningkatan. Dalam sistem cooperative farming salah satu sumbangan yang paling penting dari petani adalah modal sosial berupa jejaring sosial yaitu kelompok tani sehamparan, disamping sumbangan modal ekonomi, modal alami, dan modal sosial lainnya. Kelompok tani merupakan wadah pengikat yang memungkinkan setiap petani memetik manfaat berupa tindakan kolektif yang menjamin ketepatan, keserempakan dan keterpaduan aplikasi teknologi dan manajemen agribisnis modern dalam usahatani. Potensi kelompok tani dalam pembangunan pertanian tanaman

pangan dan hortikultura akan memegang peranan yang sangat besar.

Pendekatan *cooperative farming* pun menghadirkan warna baru atas kelembagaan pedesaan, seperti dengan hadirnya tenaga pendamping (*community organizer*), kredit lunak, kelompok tani sehamparan, dan sebagainya (Sa'id dan Intan, 2001). Beberapa lembaga keuangan seperti BRI, BPR, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin turut serta mengucurkan berbagai skim kredit kepada petani. Kehadiran kelembagaan keuangan formal semakin menambah pembendaharaan kelembagaan-kelembagaan keuangan non formal yang sudah lebih dulu eksis dalam masyarakat (Setiawan, 2008).

Beberapa dampak *cooperative farming* atas keberdayaan petani yang bersifat jangka pendek adalah: 1) Petani dapat melaksanakan dan menerapkan teknologi usahatani secara optimal; 2) Petani dapat mengapresiasi atau menyalurkan aspirasinya, kebutuhan dan permasalahannya dalam komunikasi kelompok; 3) Posisi tawar petani meningkat, karena mampu secara partisipatif terlibat dalam pengambilan keputusan dan penentuan harga; 4) Akses petani terhadap informasi dan sumberdaya produktif lainnya meningkat, seperti terhadap informasi harga, sarana produksi pertanian, dan modal pinjaman; 5) Petani terhindar dari kecurangan-kecurangan para tengkulak, bandar, dan para penjual sarana produksi pertanian liar, karena segala sesuatu sudah disepakati dan diselesaikan melalui kelompok.

Sedangkan dampak *cooperative farming* atas keberdayaan petani dalam jangka panjang adalah pemasaran hasil dan pengelolaan hasil melalui kelompok tani. Satu hal yang dapat terjaga keberlanjutannya adalah keberdayaan ekonomi dalam bentuk agroindustri makanan ringan yang karena keterkaitannya dengan ketersediaan bahan baku di tingkat lokal memungkinkan untuk tetap berdiri dan

dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa model *cooperative farming* dalam penerapannya dapat secara efektif memberdayakan petani melalui kelompok tani. Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. Pencapaian target efisiensi usahatani dapat dilakukan melalui keterpaduan kegiatan penyediaan saprodi, pola tanam yang serentak, keseragaman teknologi, pascapanen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Hak pribadi masing-masing petani atas kepemilikan lahan tidak terusik dengan tidak adanya konsolidasi lahan.

Cooperative farming secara langsung telah memberdayakan lembaga tani yang ada, yaitu kelompok tani, mengembangkan kualitas SDM melalui penyuluhan tentang pentingnya kemitraan, kesepakatan dan kebersamaan. Selain itu, jalinan kerjasama yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dengan pihak swasta, dengan fasilitator pemerintah telah mampu mengurangi cara-cara koordinasi yang bersifat top-down dan sentralistik. Pemerintah memfasilitasi petani dengan pemberdayaan secara *bottom-up* dan terdesentralisasi, sehingga lebih mengenai sasaran utama, yaitu mengembangkan kualitas SDM petani. Petani akan secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai sense of belonging yang tinggi akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut berasal/ beranggotakan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk mereka sendiri. Tujuan akhirnya, rantai pemasaran menjadi pendek dan lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan pendapatannya meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada gapoktan Simantri di Provinsi Bali, dimana petani gapoktan Simantri turut berperan aktif dalam membuka akses pasar dengan membentuk Asosiasi Simantri Bali yang mengumpul-

kan dan menjual produk pupuk organik hasil olahan petani anggota Simantri (Sanatana, 2018).

4. Simpulan

Model *Cooperative farming* lahir sebagai bentuk reaksi dan kritik petani atas model *estate farming* dan *corporate farming* yang berbasis kapital, swasta, dan maksimalisasi keuntungan, yang jelas-jelas bertentangan dengan konsepsi pemberdayaan (*empowerment*) dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (*community development*). Karena model *cooperative farming* lahir secara sosial, maka mekanisme kerjanya pun dibangun atas dasar pendekatan partisipatif dengan tetap mensinergikannya dengan konsep-konsep manajemen modern yang didapat dari sarjana pendamping (*Community Organizer*). Hadirnya model *cooperative farming* memberikan peran sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang sangat besar terhadap petani, keluarga petani dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian potensi pengembangan *cooperative farming* sebagai alternatif strategi pemberdayaan petani Indonesia yang rata-rata berlahan sempit dan bermodal kecil sangat terbuka lebar.

Keunggulan model *cooperative farming* dibandingkan model *estate farming* dan *corporate farming* intinya karena berbasis masyarakat, sehingga segala sesuatu manfaatnya mengalir kepada petani kembali, tidak kepihak swasta. Parapetani yang sebagian besar berstatus penggarap pun bisa tetap terlibat, melakukan aktivitas, dan tidak hilang matapencariannya. Model *cooperative farming* lebih bersifat memberdayakan petani, keluarga, dan mengembangkan masyarakat sekitarnya. Hal ini dicirikan dengan kentalnya nuansa demokratis, partisipatif, transparan, dan menjunjung akuntabilitas dalam setiap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan kelompok.

Dampak pengembangan model *cooperative farming* atas keberdayaan petani, keluarga petani dan masyarakat sekitarnya jelas sangat besar sekali, baik terhadap aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Secara ekonomi pendapatan petani meningkat, kesadaran untuk

menabung baik dalam bentuk uang maupun gabah tumbuh, kesadaran membayar pajak juga meningkat, dan berkembangnya agroindustri. Secara sosial akses petani atas berbagai sumberdaya produktif meningkat, posisi tawar petani meningkat, partisipasi petani dalam pengambilan berbagai keputusan meningkat, dan komunikasi petani dengan petani dan pihak lainnya juga meningkat. Secara teknis produktivitas usahatani petani pun meningkat. Secara kelembagaan, kemampuan petani dalam pembuatan keputusan, peraturan, administrasi dan aspek legal pun meningkat.

5. Rekomendasi

Karena model *cooperative farming* tidak jauh berbeda dengan model kelompok tani, maka perlu dijaga konsistensi model tersebut agar jangan berakhir seperti nasib ribuan kelompok tani di Indonesia yang hanya tinggal nama saja.

Pengembangan model *cooperative farming* perlu dilakukan secara partisipatif, artinya jangan digeneralisir langsung oleh pemerintah ke seluruh pelosok, karena kondisi sosial budaya masyarakat setempat sangat berpengaruh, dan jangan terjebak dalam penumpukan modal kapital dan intervensi berlebihan, karena kelompok bisa terjebak dalam model rekayasa sosial (*social engineering*).

Referensi

- Adimihardja, K. (1999). *Petani, Merajut Tradisi Era Globalisasi*. HUP, Bandung
- Aliansi Organisme Indonesia. 2010. Sub-sidi Pemerintah dan Bantuan Donor : Jebakan Ketergantungan. Majalah Petani, Juni-Agustus 2010
- Bappenas. 2014. *Analisis Rumah Tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013*. Jakarta : Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas
- Chambers, R., Pacey, A, and Thrupp, L.A. (1989). *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research*. London: Intermediate Technology Publications
- Candra. 2001. *Studi Kemungkinan Penerapan Sistem Corporate Farming*. Skripsi. Bandung : Unpad
- Krismantoroadji, Teguh. 2003. *Kajian Pemberdayaan Petani Sayuran Melalui Kemitraan*. Disertasi. Bandung : Unpad
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES
- Nuryanti, S., 2005. *Cooperative Farming untuk Peningkatan Pendapatan Petani*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor. Tabloid Sinar Tani. 29 Juni–5 juli 2005.
- Pannell, D.J. 1999. *Social and Economic Challenges in the Development of Complex Farming System*. *Agroforestry System*. 45 :393-409
- Rivera, W.M., and Gustafson, D.J. 1991. *Agricultural Extension: Worldwide Institutional Evolution and Forces for Change*. Amsterdam: Elsevier Science Publishing
- Sanatana, I Made Mahadi. 2018. *Peran Pemerintah, Sumber Daya Petani, Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Program Simantri Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Dan Kesejahteraan Petani Di Provinsi Bali*. Disertasi. Bali: UNUD
- Sa'id, E dan Intan, H. 2000. *Pembangunan Agribisnis*. Bogor : IPB
- Setiawan, Iwan. 2002. *Strategi Pemberdayaan Komunikasi Petani*. IPB, Bogor
- Setiawan, Iwan. 2008. *Collective Farming Sebagai Alternatif Strategi Pemberdayaan Petani (Suatu Kasus di Desa Rancakasumba Kabupaten Bandung)*. Laporan Penelitian. Bandung : UNPAD
- Simatupang, P. 2002. *Reformasi Agraria Menuju Pertanian Berkelanjutan: Komentar Terhadap Makalah Profesor Mubyarto*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. 1 (8): 1-2\
- Sinaga and White (1980). *Problem of Institutional Agriculture in Indonesia*. Jakarta : UI
- Suradisastra, Kedi. 2006. *Revitalisasi Kelembagaan untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Otonomi Daerah*. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No. 4, Desember 2006 : 282-314